

ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN MALINAU TAHUN 2013

Bayu Imam Prakoso, L.C.A. Robin Jonathan², Elfreda A Lau³,

Fakultas Ekonomi, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRAKSI

Kebutuhan air bersih baik di perkotaan maupun di pedesaan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah. PDAM Kabupaten Malinau yang bertugas dan bertanggung jawab atas penyediaan air bersih di Kabupaten Malinau diharapkan mampu memberikan pelayanan secara baik kepada masyarakatnya.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Apakah kinerja PDAM Kabupaten Malinau Tahun 2013 telah menunjukkan kinerja yang baik berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999?”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil penilaian kinerja pada aspek keuangan, operasional, dan administrasi PDAM Kabupaten Malinau selama tahun 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 47 Tahun 1999 serta memberikan saran perbaikan dan penyempurnaan kualitas pelayanan air minum sehingga diharapkan dapat tercapainya PDAM dengan kinerja organisasi yang efektif dan efisien.

Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah akuntansi manajemen yaitu adalah suatu kegiatan (proses) yang menghasilkan informasi keuangan bagi manajemen untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam melaksanakan fungsi manajemen serta pengukuran kinerja yaitu suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan rumusan masalah dan dasar teori tersebut, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: “Kinerja PDAM Kabupaten Malinau tahun 2013 berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 tahun 1999 belum menunjukkan kinerja yang baik.”

Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesa adalah dengan menggunakan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Kinerja PDAM yang terdiri dari penilaian kinerja pada tiga aspek yaitu aspek keuangan, operasional, dan administrasi yang masing-masing terdiri dari sepuluh indikator.

Berdasarkan hasil penilaian akhir kinerja, diperoleh nilai akhir sebesar 54,69 dan PDAM Kabupaten Malinau berada dalam Kategori Cukup, yang artinya cukup memenuhi pada kinerja pelayanan yang diharapkan sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak.

Kata kunci: kinerja

Latar Belakang

Penyediaan air bersih di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks, mulai dari anggaran, pencemaran, maupun sikap dari masyarakat. Pengelolaan air bersih ini berpacu dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat serta perkembangan wilayah dan industri yang cepat.

Pemerintah Kabupaten Malinau yang berkewajiban memenuhi kebutuhan air bersih dan memfasilitasi pembangunan serta pengembangan infrastruktur sistem penyediaan air bersih bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Malinau kemudian mendelegasikan tugas tersebut kepada PDAM Kabupaten Malinau yang merupakan badan usaha milik pemerintah Kabupaten Malinau yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 tahun 2002 tanggal 13 Februari 2003 dan berkedudukan di Kabupaten Malinau.

PDAM Kabupaten Malinau adalah perusahaan yang berdiri karena pembentukan Kabupaten Malinau sebagai daerah otonom sehingga PDAM Kabupaten Bulungan melakukan penyerahan aset dan pengelolaan PDAM unit IKK Malinau melalui Berita Acara Serah Terima Nomor 027/14/UM/I/2002 tanggal 23 Januari 2002.

Berdasarkan data/informasi dari bagian Hubungan Langganan PDAM Kabupaten Malinau, sampai dengan akhir tahun 2013 belum semua penduduk di wilayah Kabupaten Malinau yang terlayani air bersih PDAM. Jumlah penduduk yang terlayani sebanyak 31.920 jiwa atau 38,51% dari jumlah penduduk sebanyak 82.880 jiwa. Sedangkan penduduk di wilayah teknis yang terlayani sebanyak 31.920 jiwa atau 58,28% dari jumlah penduduk yang ada jaringan pipa PDAM sebanyak 54.774 jiwa. Persentase pelayanan ini masih dibawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 bidang kesehatan (air bersih) untuk tahun 2013 sebesar 63,5%.

Selain masih rendahnya prosentase pemenuhan pelayanan tersebut, dari data Laporan Produksi dan Distribusi Air (*Sumber: Bagian Teknik PDAM Kabupaten Malinau*) menunjukkan bahwa PDAM Kabupaten

Malinau juga mengalami beberapa permasalahan lain, sebagai berikut ini.

1. Dari empat Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang dimiliki dan dipergunakan untuk memproduksi air bersih di Kabupaten Malinau, tercatat kapasitas yang dapat dimanfaatkan sebesar 124,33 liter/detik dari kapasitas yang terpasang sebesar 142,50 liter/detik. Sehingga terdapat kapasitas yang tidak dimanfaatkan sebesar 18,17 liter/detik atau 12,75%.
2. Jumlah volume air yang terjual pada tahun 2013 sebesar 1.924.406,33m³ dari jumlah volume air yang didistribusikan sebesar 2.726.639,62m³. Hal ini menunjukkan bahwa angka kebocoran air atau *Non Revenue Water (NRW)* distribusi sebesar 802.233,29m³ atau 29,42%. Persentase *NRW* ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan sebesar 20%.

Berdasarkan laporan hasil audit kinerja PDAM Kabupaten Malinau Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Nomor LAK-284/PW17/4/2013 tanggal 14 Mei 2013 juga menunjukkan bahwa kinerja PDAM Kabupaten Malinau memperoleh nilai 53,96 poin dari nilai maksimal 100,00 dan termasuk dalam kategori Cukup.

Perumusan Masalah

Memperhatikan uraian latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Apakah kinerja PDAM Kabupaten Malinau Tahun 2013 telah menunjukkan kinerja yang baik berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999?”.

Dasar Teori

1. Akuntansi Manajemen

Menurut Abdul Halim dan Bambang Supomo (2001, 3), “Akuntansi Manajemen adalah suatu kegiatan (proses) yang menghasilkan informasi keuangan bagi manajemen untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam melaksanakan fungsi manajemen”.

Mulyadi (2001, 3) menyatakan bahwa pengertian akuntansi manajemen adalah informasi keuangan yang merupakan keluaran yang dihasilkan oleh tipe akuntansi manajemen, yang dimanfaatkan terutama oleh pemakai intern organisasi.

2. Kinerja

Hiroyudha (2007, 6) mengutip pernyataan Gordon Robertson tentang definisi pengukuran kinerja sebagai berikut: "Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan."

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penetapan tentang seberapa jauh capaian yang mampu diraih perusahaan melalui kegiatan operasionalnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka mempermudah perusahaan menentukan aspek keberhasilan atau kegagalan atas penggunaan sumber daya yang ada. Pengukuran ini menuntut aspek-aspek tersebut harus dikuantifikasi atau dinyatakan dalam bentuk angka.

3. Penilaian Kinerja menurut Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999

Penilaian kinerja PDAM menurut Kepmendagri Nomor 47 tahun 1999 meliputi tiga aspek, yaitu aspek operasional, keuangan, dan administrasi. Ketiga aspek tersebut memiliki indikator penilaian masing-masing.

Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan dasar teori yang telah dikemukakan, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: "Kinerja PDAM Kabupaten Malinau tahun 2013 berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 tahun 1999 belum menunjukkan kinerja yang baik."

Alat Analisis

Kinerja PDAM Kabupaten Malinau dapat diketahui dengan melakukan pengukuran

berdasarkan peraturan yang berlaku dalam penilaian kinerja PDAM yaitu penilaian kinerja PDAM berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM, dinilai berdasarkan aspek keuangan, operasional, dan administrasi yang masing-masing aspek memiliki indikator dengan penilaian masing-masing.

1. Nilai Indikator Kinerja Aspek Keuangan

Penilaian kinerja aspek keuangan berdasar Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 memiliki sepuluh aspek atau kriteria penilaian yang masing-masing memiliki indikator penilaian seperti ditunjukkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

No	Indikator	Nilai Indikator Kinerja	
		Rasio	Nilai
1	Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif $\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$	> 10%	5
		> 7% - 10%	4
		> 3% - 7%	3
		> 0% - 3%	2
		$\leq 0\%$	1
	Bonus: Rasio tahun ini - Rasio tahun lalu	> 12 %	5
	> 9% - 12%	4	
	> 6% - 9%	3	
	> 3% - 6%	2	
	> 0% - 3%	1	
2	Rasio Laba terhadap Penjualan $\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$	> 20%	5
		> 14% - 20%	4
		> 6% - 14%	3
		> 0% - 6%	2
		$\leq 0\%$	1
	Bonus:	> 12 %	5
	> 9% - 12%	4	
	> 6% - 9%	3	
	> 3% - 6%	2	
	> 0% - 3%	1	
3	Rasio Aktiva Lancar terhadap Utang Lancar $\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$	> 1,75-2,00	5
		> 1,50-1,75 atau > 2,00-2,30	4
		> 1,25-1,50 atau > 2,30-2,70	3
		> 1,00-1,25 atau > 2,70-3,00	2
		$\leq 1,00$ atau > 3,00	1
4	Rasio Utang Jangka Panjang $\frac{\text{Utang Jangka Panjang}}{\text{Ekuitas}}$	$\leq 0,5$	5
		> 0,5 - 0,7	4
		> 0,7 - 0,8	3
		> 0,8 - 1,0	2
	> 1,0	1	
5	Rasio Total Aktiva terhadap Total Utang $\frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Utang}}$	> 2,0	5
		> 1,7 - 2,0	4
		> 1,3 - 1,7	3

No	Indikator	Nilai Indikator Kinerja	
		Rasio	Nilai
		> 1,0 - 1,3	2
		<= 1,0	1
6	Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi $\frac{\text{Biaya Operasi}}{\text{Pendapatan Operasi}}$	<= 0,5	5
		> 0,5 - 0,65	4
		> 0,65 - 0,85	3
		> 0,85 - 1,0	2
		> 1,0	1
7	Rasio Laba Operasi Sebelum Penyusutan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo Laba (Rugi) Operasi Sebelum Penyusutan	> 2,0	5
		> 1,7 - 2,0	4
		> 1,3 - 1,7	3
		> 1,0 - 1,3	2
	(Angsuran Pokok & Bunga) Jatuh Tempo	<= 1,0	1
8	Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air $\frac{\text{Aktiva Produktif}}{\text{Penjualan Air}}$	<= 2	5
		> 2 - 4	4
		> 4 - 6	3
		> 6 - 8	2
		> 8	1
9	Jangka Waktu Penagihan Piutang $\frac{\text{Piutang Usaha}}{\text{Jumlah Penjualan per Hari}} \times 100\%$	<= 60	5
		> 60 - 90	4
		> 90 - 150	3
		> 150 - 180	2
		> 180	1
10	Efektifitas Penagihan Rekening Tertagih Penjualan Air $\times 100\%$	> 90%	5
		> 85% - 90%	4
		> 80% - 85%	3
		> 75% - 80%	2
		<= 75%	1
Jumlah Nilai Kinerja Maksimum Aspek Keuangan			60

Sumber: Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999

2. Nilai Indikator Kinerja Aspek Operasional

Penilaian kinerja aspek operasional berdasar Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 memiliki sepuluh aspek atau kriteria penilaian yang masing-masing memiliki indikator penilaian seperti ditunjukkan pada Tabel, sebagai berikut:

No	Indikator	Nilai Indikator Kinerja	
		Rasio	Nilai
1	Cakupan Pelayanan $\frac{\text{Jumlah Penduduk Terlayani}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	> 60%	5
		> 60% - 80%	4
		> 40% - 60%	3
		> 20% - 40%	2
		<= 20%	1
	Nilai Bonus:	> 8%	5
	Peningkatan Cakupan Pelayanan	> 6% - 8%	4
		> 4% - 6%	3
		> 2% - 4%	2
		> 0% - 2%	1
2	Kualitas Air Distribusi Memenuhi Syarat Air Minum (MSAM)	-	3
	Memenuhi Syarat Air Bersih (MSAB)	-	2

No	Indikator	Nilai Indikator Kinerja	
		Rasio	Nilai
	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	-	1
3	Kontinuitas Air Semua pelanggan mendapat aliran air 24 jam Belum semua pelanggan mendapat aliran air 24 jam	-	2
		-	1
4	Produktivitas Pemanfaatan Instalasi $\frac{\text{Kapasitas Produksi}}{\text{Kapasitas Terpasang}} \times 100\%$	> 90%	4
		> 80% - 90%	3
		> 70% - 80%	2
		<= 70%	1
5	Tingkat Kehilangan Air $\frac{\text{Jumlah m3 air didistribusikan - yang terjual}}{\text{Jumlah m3 Air Didistribusikan}} \times 100\%$ Nilai Bonus: Penurunan Tingkat Kehilangan Air	<= 20%	4
		> 20% - 30%	3
		> 30% - 40%	2
		> 40%	1
6	Peneraan Meter Air $\frac{\text{Jumlah Pelanggan yang Ditera}}{\text{Jumlah Seluruh Pelanggan}} \times 100\%$	> 20% - 25%	3
		> 10% - 20%	2
		> 0% - 10% atau > 25%	1
7	Kecepatan Penyambungan Baru	<= 6 hari kerja	2
		> 6 hari kerja	1
8	Kemampuan Penanganan Pengaduan Rata-Rata per Bulan	>= 80%	2
		< 80%	1
9	Kemudahan Pelayanan	Tersedia	2
		Tidak Tersedia	1
10	Rasio Karyawan per 1000 Pelanggan	<= 8	5
		> 8 - 11	4
		> 11 - 15	3
		> 15 - 18	2
		> 18	1
Jumlah Nilai Kinerja Maksimum Aspek Operasional			47

Sumber: Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999

3. Nilai Indikator Kinerja Aspek Administrasi

Penilaian kinerja aspek administrasi berdasar Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 memiliki sepuluh aspek atau kriteria penilaian yang masing-masing memiliki indikator penilaian seperti ditunjukkan pada Tabel, sebagai berikut:

No	Indikator	Nilai Indikator Kinerja	
		Rasio	Nilai
1	Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan)	- Sepenuhnya Dipedomani	4
		- Dipedomani Sebagian	3
		- Memiliki, Belum Dipedomani	2
		- Tidak Memiliki	1
2	Rencana Organisasi dan Uraian Tugas	- Sepenuhnya Dipedomani	4
		- Dipedomani Sebagian	3
		- Memiliki, Belum Dipedomani	2
		- Tidak Memiliki	1

No	Indikator	Nilai Indikator Kinerja	
		Rasio	Nilai
3	Prosedur Operasi Standar	- Sepenuhnya Dipedomani	4
		- Dipedomani Sebagian	3
		- Memiliki, Belum Dipedomani	2
		- Tidak Memiliki	1
4	Gambar Nyata Laksana (As Built Drawing)	- Sepenuhnya Dipedomani	4
		- Dipedomani Sebagian	3
		- Memiliki, Belum Dipedomani	2
		- Tidak Memiliki	1
5	Pedoman Penilaian Kinerja Karyawan	- Sepenuhnya Dipedomani	4
		- Dipedomani Sebagian	3
		- Memiliki, Belum Dipedomani	2
		- Tidak Memiliki	1
6	Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)	- Sepenuhnya Dipedomani	4
		- Dipedomani Sebagian	3
		- Memiliki, Belum Dipedomani	2
		- Tidak Memiliki	1
7	Tertib Laporan Internal	Tepat Waktu	2
		Tidak Tepat Waktu	1
8	Tertib Laporan Eksternal	Tepat Waktu	2
		Tidak Tepat Waktu	1
9	Opini Auditor Independen	- Wajar Tanpa Pengecualian	4
		- Wajar Dengan Pengecualian	3
		- Tidak Memberikan Pendapat	2
		- Pendapat Tidak Wajar	1
10	Tindak Lanjut Hasil Audit Tahun Terakhir	- Tidak Ada Temuan	4
		- Ditindaklanjuti, Seluruhnya Selesai	3
		- Ditindaklanjuti, Sebagian Selesai	2
		- Tidak Ditindaklanjuti	1
Jumlah Nilai Kinerja Maksimum Aspek Administrasi			36

Sumber: Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999

Berdasarkan hasil penilaian kinerja Perusahaan Daerah Air Minum menurut Kepmendagri Nomor 47 tahun 1999, selanjutnya Perusahaan Daerah Air Minum dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori dengan indikator seperti yang ditunjukkan pada Tabel berikut ini.

Nilai (Skor)	Kategori	Indikator
>75	Baik Sekali	Melebihi dari kinerja yang diharapkan
>60 – 75	Baik	Telah mencapai kinerja pelayanan yang diharapkan
>45 – 60	Cukup	Cukup memenuhi kinerja pelayanan yang diharapkan
>30 – 45	Kurang	Kurang memenuhi kinerja pelayanan yang diharapkan
≤ 30	Tidak Baik	Masih jauh dari kinerja pelayanan yang diharapkan

Sumber: Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999

Hasil Penelitian

1. Penilaian Kinerja Aspek Keuangan

Dari hasil perhitungan dan analisis 10 aspek kinerja keuangan kemudian dirangkum dalam tabel rekap penilaian kinerja aspek keuangan, seperti pada Tabel berikut ini.

No	Aspek Penilaian	Hasil Analisis	
		Rasio	Nilai
1	Rasio laba terhadap aktiva produktif	-1,35%	1
	Bonus peningkatan rasio dari tahun lalu	0	0
2	Rasio laba terhadap penjualan	-1,55%	1
	Bonus: Peningkatan rasio dari tahun lalu	0	0
3	Rasio aktiva lancar terhadap utang lancar	827,95	1
4	Rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas	0	5
5	Rasio total aktiva terhadap total utang	1347,27	5
6	Rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi	1,02	1
7	Rasio laba operasi sebelum penyusutan terhadap angsuran pokok dan bunga jatuh tempo	~	5
8	Rasio aktiva produktif terhadap penjualan air	1,32	5
9	Jangka waktu penagihan piutang	34,58	5
10	Efektifitas penagihan	90,97%	5
Jumlah Penilaian Aspek Keuangan			34

Sumber: Data Diolah, 2014.

2. Penilaian Kinerja Aspek Operasional

Dari hasil perhitungan dan analisis 10 (sepuluh) aspek kinerja operasional kemudian dirangkum dalam tabel rekap penilaian kinerja aspek operasional, seperti pada Tabel di bawah ini.

No	Aspek Penilaian	Hasil Analisis	
		Rasio	Nilai
1	Cakupan pelayanan	38,51%	3
	Bonus: peningkatan cakupan pelayanan	4,12%	3
2	Kualitas air distribusi	MSAB	2
3	Kontinuitas Air	Belum semua 24	1

No	Aspek Penilaian	Hasil Analisis	
		Rasio	Nilai
		jam	
4	Produktivitas pemanfaatan instalasi produksi	87,25%	3
5	Tingkat kehilangan air	29,42%	3
	Bonus: penurunan tingkat kehilangan air	-4,94%	0
6	Peneraan meter air	0%	0
7	Kecepatan Penyambungan Baru	<= 6 hari	2
8	Kemampuan Penanganan Pengaduan Rata-Rata per Bulan	74,82%	1
9	Kemudahan pelayanan <i>Service point</i> tersedia di luar kantor pusat	Tersedia	2
10	Rasio karyawan per 1.000 pelanggan	7,89	5
Jumlah Penilaian Aspek Operasional			25

Sumber: Data Diolah, 2014.

3. Penilaian Kinerja Aspek Administrasi

Dari hasil penilaian kinerja aspek administrasi, yang terdiri dari sepuluh aspek penilaian kinerja, maka diperoleh total hasil penilaian kinerja seperti Tabel sebagai berikut:

No	Aspek Penilaian	Hasil Analisis	
		Rasio	Nilai
1	Rencana Jangka Panjang (<i>Corporate Plan</i>)	Tidak memiliki	1
2	Rencana Organisasi dan Uraian Tugas	Dipedomani sebagian	3
3	Prosedur Operasi Standar	Dipedomani sebagian	3
4	Gambar Nyata Laksana (<i>As Built Drawing</i>)	Tidak memiliki	1
5	Pedoman Penilaian Kerja Karyawan	Memiliki, belum dipedomani	2
6	Rencana Kerja dan Anggaran	Memiliki, belum	2

No	Aspek Penilaian	Hasil Analisis	
		Rasio	Nilai
	Perusahaan (RKAP)	dipedomani	
7	Tertib Laporan Internal	Tidak tepat waktu	1
8	Tertib Laporan Eksternal	Tidak tepat waktu	1
9	Opini Auditor Independen	Wajar dengan pengecualian	3
10	Tindak Lanjut Hasil Audit Tahun Terakhir	Ditindaklanjuti, sebagian selesai	2
Jumlah Penilaian Aspek Administrasi			19

Sumber: Data Diolah, 2014.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penilaian kinerja PDAM Kabupaten Malinau menurut Kepmendagri Nomor 47 tahun 1999 dari ketiga aspek tersebut di atas, dengan memperhitungkan bobot masing-masing aspek kinerja dapat diketahui hasil akhir penilaian kinerja sebagaimana ditunjukkan pada Tabel sebagai berikut:

No.	Aspek Kinerja	Nilai Maksimum	Bobot (%)	Nilai Kinerja	Nilai Akhir
a	b	c	d	e	f=(e/c)xd
1.	Aspek Keuangan	60	45	34	25,50
2.	Aspek Operasional	47	40	25	21,28
3.	Aspek Administrasi	36	15	19	7,92
Jumlah Akhir Nilai Kinerja			100		54,69

Sumber: Data Diolah, 2014.

Hasil penilaian akhir kinerja yang ditinjau dari ketiga aspek penilaian diperoleh nilai akhir sebesar 54,69. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM, nilai akhir tersebut berada pada nilai skor > 45 - 60. Dengan hasil penilaian tersebut maka PDAM Kabupaten Malinau berada dalam Kategori Cukup, yang artinya cukup memenuhi pada kinerja pelayanan yang diharapkan sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini ditolak.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang meliputi penilaian kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Malinau Tahun 2013 berdasarkan

Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penilaian akhir analisis kinerja PDAM Kabupaten Malinau Tahun 2013 berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 yang ditinjau dari ketiga aspek penilaian yaitu aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi diperoleh nilai akhir sebesar 54,69 dan berada dalam Kategori Cukup, yang artinya cukup memenuhi pada kinerja pelayanan yang diharapkan sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini ditolak.
2. Kinerja PDAM Kabupaten Malinau Tahun 2013 masih belum menunjukkan kinerja yang baik terutama disebabkan oleh kondisi keuangan perusahaan yang masih mengalami kerugian, masih rendahnya cakupan pelayanan, kontinuitas air yang masih kurang dari 24 jam, belum dilakukannya peneraan meter pelanggan, kemampuan penanganan pengaduan yang belum maksimal, perusahaan belum menyusun Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan), perusahaan belum memiliki Gambar Nyata Laksana (*As Built Drawing*) jaringan distribusi, laporan internal dan eksternal yang belum di laporkan secara tertib dan tepat waktu, serta masih terdapat hasil audit tahun terakhir yang belum ditindaklanjuti.

PDAM Kabupaten Malinau masih berpeluang untuk dapat meningkatkan kinerja di masa yang akan datang dengan melakukan beberapa hal yang dapat kami sarankan sebagai berikut:

1. Melakukan efisiensi biaya produksi air sehingga rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi dapat turun dan agar dilakukan penekanan pada biaya-biaya umum dan administrasi serta disiplin terhadap anggaran biaya (RKAP).
2. Meningkatkan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat dengan cara memperluas dan menambah jaringan distribusi serta meningkatkan pemasangan sambungan pelanggan baru.
3. Mengupayakan menekan tingkat kehilangan air maksimal 20% dengan

melakukan perbaikan jaringan distribusi dan melakukan peneraan dan penggantian *water meter* yang rusak.

4. Meningkatkan persentase rasio kemampuan penanganan pengaduan pelanggan menjadi minimal 80% tertangani.
5. Menyusun Rencana Jangka Panjang Lima Tahun (*Corporate Plan*).
6. Menyusun Gambar Nyata Laksana (*As Built Drawing*) untuk seluruh sistem distribusi.

Bagi PDAM Kabupaten Malinau dan peneliti selanjutnya disarankan pula untuk melakukan penelitian potensi sumber-sumber air yang ada di wilayah Kabupaten Malinau untuk pengembangan jaringan distribusi air bersih PDAM di Kabupaten Malinau sehingga dapat meningkatkan cakupan pelayanan yang saat ini masih sebesar 38,51%.

Daftar Pustaka

- Anonim. 1999. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tanggal 31 Mei 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum*.
- _____. 2013. *Laporan Hasil Audit Kinerja PDAM Kabupaten Malinau Tahun 2012*. Samarinda: Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.
- Hiroyudha, Niko. 2007. *Analisis Kemungkinan Penggunaan Balance Scorecard sebagai Metode dalam Pengukuran Kinerja pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Selatan Satu*. Skripsi dalam Program Diploma IV. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andy.
- Mulyadi. 2001. *Akuntansi Manajemen Konsep Manfaat dan Rekayasa*. Edisi kedua cetakan pertama. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Rai, I Gusti Agung. 2008. *Audit Kinerja pada Sektor Publik: Konsep, Praktik, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.